



DIMINTA KONSISTEN SIAPKAN 1.000 TON PER HARI

Rencana Pembangunan PSEL Hadapi Kendala

YOGYA (KR) - Rencana pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di DIY masih menghadapi sejumlah kendala. Karena pemerintah pusat mensyaratkan sejumlah kriteria yang cukup dilematis bagi Pemda DIY serta kabupaten/kota.

Salah satu syarat krusial yang diajukan adalah komitmen penyediaan sampah minimal 1.000 ton per hari secara konsisten selama 30 tahun ke depan. Syarat itu wajib dipenuhi mengingat proyek PSEL akan melibatkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan investor.

"Sisi positifnya adalah semua sampah bisa langsung diolah menjadi energi listrik tanpa perlu dipilah. Namun, konsekuensinya sangat memberatkan, karena daerah harus berkomitmen menyiapkan pa-

sokan sampah selama 30 tahun di atas 1.000 ton per hari secara konsisten. Memang berdasarkan data Pemda DIY, total produksi sampah dari tiga wilayah, yakni Kota Yogyakarta sekitar 300 ton/hari, Sleman 400 ton/ hari dan Bantul 700 ton/ hari," kata Sekda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu (1/10).

Dikatakan, meski secara sepintas jumlahnya mencukupi, tapi persoalannya tidak sesederhana itu. Pasaunya saat

ini, Sleman dan Bantul hanya menyumbang sekitar separuh dari total sampah yang mereka hasilkan ke TPA Piyungan. Sisanya sudah dikelola secara mandiri melalui berbagai program seperti RDF (Refuse Derived Fuel), incinerator skala kecil, atau program pemberdayaan masyarakat untuk pengurangan volume sampah. Jadi kewajiban menyeter sampah 1.000 hingga 1.200 ton per hari menjadi kendala utama karena bertentangan dengan tren pengelolaan sampah modern yang justru berfokus pada pengurangan volume melalui prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R).

"Apabila DIY diwajibkan menyeter sampah dalam jumlah besar, maka akan terjadi kontradiksi dengan kebijakan pengurangan sampah yang se-



KR-Riyana Ekawati

Ni Made Dwipanti Indrayanti

dang digalakkan," ungkapnya. Menurut Made, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, telah memberikan arahan dan meminta agar pengolahan sampah juga diarahkan untuk menghasilkan biomassa atau bahan bakar alternatif untuk industri semen. Jadi tidak seluruhnya dijadikan listrik. Opsi biomas-

sa/RDF ini dinilai lebih fleksibel karena memungkinkan daerah yang tidak mampu memenuhi kuota 1.000 ton/hari tetap berpartisipasi dalam program pengolahan skala besar tanpa terikat kontrak panjang yang memberatkan.

"Kalau semua diarahkan ke listrik memang sulit. Ada juga opsi RDF untuk bahan bakar semen, atau biomassa. Bahkan ada tawaran dari investor asing untuk mengolah plastik menjadi energi. Jadi opsi-opsi ini masih dalam tahap diskusi," jelas Made seraya menambahkan, guna menentukan sikap final apakah DIY akan mengikuti skema PSEL dari pusat atau memilih alternatif lain, Pemda DIY akan mengadakan pembahasan intensif bersama para bupati dan walikota minggu depan. **(Ria)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005